



BATAMTODAY.COM

INSPIRASI MASYARAKAT KEPRI

Gallery Foto



Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda LPP APBD Kepri 2016

Rabu, 23 Agustus 2017 | 10.00.00 WIB | BATAMTODAY.COM Gallery Foto

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Provinsi Kepri mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2016, Senin (21/8/2017).

Dalam rapat paripurna pengesahan Ranperda ini, Pansus Ranperda LPP APBD 2016 memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk diperbaiki ke depannya, yang disampaikan juru bicara Pansus Onward Siahaan, di antaranya Pemprov Kepri harus berupaya mengurangi ketergantungan dana transfer dari pusat.

Pansus juga menekankan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kepri harus bekerja lebih optimal untuk menggali pajak dan retribusi daerah dan pendapatan lain-lainnya yang sah. Lainnya, Pemprov Kepri agar dapat mempertahankan opini WTP pada tahun berikutnya. Untuk mempertahankan raihan prestasi tersebut, Pemprov harus meningkatkan pengendalian internal dan kepatuhan atas perundang-undangan, mengingat banyak temuan dari hasil pemeriksaan dari Badan Periksa Keuangan (BPK) RI.

"Pansus merekomendasikan agar Gubernur mengevaluasi dan menempatkan tenaga ahli yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan di setiap perangkat daerah dengan sistem akuntansi yang berbasis teknologi informasi atau e-bugeting," ujarnya Onward.

Yang tak kalah penting lagi, tambah Onward, Gubernur harus bisa memaksimalkan kinerja atau fungsi Inspektorat daerah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan realisasi program pembangunan sesuai perundang-undangan. "Melalui Inspektorat, upaya pencegahan lebih awal atau tindakan pre-emptif atas adanya kesalahan yang berujung pada penegakan hukum dapat dilakukan," ujar Onward lagi.

Pansus juga menyarankan Gubernur Kepri Nurdin Basirun membentuk tim khusus untuk melakukan pendataan aset daerah, serta pengurusan legalitas dari sertifikat kepemilikan atas aset-aset yang dimiliki. "Aset-aset yang dimiliki Pemprov Kepri yang berada di Kabupaten/Kota serta di masing-masing lingkungan OPD pemprov Kepri agar tersertifikasi dengan jelas dan yang melakukannya harus memiliki kompetensi," tambahnya.

Menyikapi kondisi merosotnya perekonomian di Kepri saat ini, Pansus juga merekomendasikan, agar Gubernur dan perangkat daerah terkait untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, serta peningkatan pengolahan pariwisata bahari.



Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, didampingi Wakil Ketua I Rizki Faisal dan Wakil Ketua II Huznizar Hood, menyerahkan Perda LPP-APBD 2016 yang sudah disahkan DPRD Kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun.



Gubernur beserta Pimpinan DPRD Kepri pada paripurna pengesahan Ranperda LPP APBD 2016.



Gubernur dan Pimpinan DPRD Kepri menandatangani berita acara sidang paripurna pengesahan Ranperda LPP APBD 2016.



Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat menanggapi sejumlah catatan dan rekomendasi yang diberikan Pansus LPP APBD DPRD Kepri.



Wakil Ketua sekaligus Juru Bicara Pansus Pansus LPP APBD 2016, Onward Siahaan, saat menyampaikan sejumlah rekomendasi dan catatan.



Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirum bersama Pimpinan DPRD Kepri yang memimpin sidang paripurna pengesahan Ranperda LPP APBD 2016.



Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak bersama Wakil Ketua I Rizki Faisal dan Wakil Ketua II Huznizar Hood.



Ketua Pansus Ranperda LPP APBD 2016, Asmin Patros, menyampaikan laporan akhir pembahasan Ranperda LPP APBD 2016.



Anggota DPRD Kepri saat menghadiri paripurna pengesahan Ranperda LPP APBD 2016.



Para Anggota DPRD Kepri saat mengikuti rapat paripurna pengesahan Ranperda LPP APBD 2016.



Sekretaris DPRD Kepri Hamidi saat membacakan keputusan paripurna pengesahan Ranperda LPP APBD 2016.

Abadikan Momen Spesial Anda di

BATAMTODAY.COM Gallery Foto

Untuk Pemesanan Hubungi :

Komplek Oriana Blok A. 02 No. 08, Batam Centre - Batam

Tlp : (0778) 7482-514, (0778) 5120-718 Email : redaksi@batamtoday.com